

Implementasi Fungsi Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kabupaten Purworejo Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

¹ Recalliandra Marella Zainenci, ² Sunny Ummul Firdaus, ³ Jadmiko Anom Husodo

¹⁻³ Universitas Sebelas Maret

Alamat : Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: recalliandra@student.uns.ac.id

Abstract. A political party is an institution that is necessary in the democratic world; if you have chosen a democratic system to regulate the life of the nation and state, one of the essential instruments in democracy is the institution of political parties. Political education is a significant activity in a nation based on democracy because democracy and the democratization process require absolute conditions for political public education; how the function of political education by the Indonesian Democratic Party of Struggle in Purworejo Regency is by Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. This study aims to analyze the implementation of norms related to the function of political education by DPC PDI Perjuangan in Purworejo Regency. This research uses an empirical approach. This study uses a qualitative descriptive analysis method with a case approach. The data used in this study are primary data obtained directly by researchers in the field through respondents through observation, interviews, and questionnaire distribution, as well as secondary data, namely data obtained or obtained from information or knowledge obtained indirectly, including official documents, books, and research results in the form of reports. The data collection techniques used in this study are field studies and literature studies. The result of this study is that there are seven political education activities carried out by PDI Perjuangan Purworejo Regency, namely, political education through socialization, political education through social, political education through art and culture, political education through religion, political education through party wing organizations, political education through seminars, political education through party schools.

Keywords: Political Party, Political Education, PDIP

Abstrak. Partai politik adalah sebuah institusi yang mutlak diperlukan dalam dunia demokrasi, apabila sudah memilih sistem demokrasi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara maka salah satu instrument penting dalam demokrasi yaitu institusi partai politik. Pendidikan politik merupakan sebuah kegiatan yang sangat penting dalam bangsa yang berlandaskan demokrasi, karena demokrasi dan proses demokratisasi memerlukan syarat mutlak bagi keterdidikan masyarakat secara politik. bagaimana fungsi pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Purworejo sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Tujuan dari penelitian ini Untuk menganalisis implementasi norma terkait fungsi pendidikan politik oleh DPC PDI Perjuangan di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket, serta data sekunder yaitu data yang diperoleh atau didapatkan dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat tujuh kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh pdi perjuangan kabupaten purworejo yaitu, pendidikan politik melalui sosialisasi, pendidikan politik melalui sosial, pendidikan politik melalui seni dan budaya, pendidikan politik melalui keagamaan, pendidikan politik melalui organisasi sayap partai, pendidikan politik melalui seminar, pendidikan politik melalui sekolah partai.

Kata kunci: Partai Politik, Pendidikan Politik, PDIP

LATAR BELAKANG

Partai politik adalah sebuah institusi yang mutlak diperlukan dalam dunia demokrasi, apabila sudah memilih sistem demokrasi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara maka salah satu instrument penting dalam demokrasi yaitu institusi partai politik. Tanpa adanya partai politik maka demokrasi tidak bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu, hidupnya demokrasi sangat tergantung pada hidup dan berkembangnya partai politik. Partai politik merupakan salah satu pilar dalam demokrasi. Dengan adanya partai politik, aspirasi dan keinginan dari rakyat dapat tersalurkan dengan baik¹. Adapun fungsi partai politik adalah bertanggung jawab terhadap pendidikan politik bagi kader partai tersebut maupun bagi masyarakat sekitar.

Pendidikan politik merupakan sebuah kegiatan yang sangat penting dalam bangsa yang berlandaskan demokrasi, karena demokrasi dan proses demokratisasi memerlukan syarat mutlak bagi keterdidikan masyarakat secara politik. Masyarakat yang terdidik secara politik tentunya adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga bisa ikut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam semua pengambilan keputusan, memantau proses keputusan publik dan melakukan advokasi terhadap akses kebijakan yang terjadi di lapangan. Rusadi menjelaskan “Pendidikan politik (*politik education, political socialization, cityzenship training*) yaitu meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi”². Hal ini yang dimaksudkan bahwa setiap proses memasyarakatkan atau sosialisasi politik harus merata ke dalam segenap lapisan masyarakat secara vertikal atau horizontal. Lebih lanjut, pengetahuan politik tidak lagi merupakan monopoli kaum elit (*super class*) saja, walaupun kaum ini sering merupakan eksponen penggerak yang vital.

Partai Politik melalui pendidikan politik memiliki peran penting dalam pembentukan karakter bangsa. Pendidikan politik merupakan sebuah proses pembelajaran yang berfokus pada pengetahuan dan pemahaman dan keterampilan yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan. Tujuan utamanya yakni membantu individu menjadi warga negara yang lebih terampil dan berpengetahuan luas tentang sistem politik, hak, dan kewajiban mereka dalam bermasyarakat, dan cara-cara mereka dapat berpartisipasi dalam proses politik. Pendidikan dan

¹ Budiardjo, M. 1998. *Partisipasi dan partai politik: sebuah bunga rampai*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia

² Kantaprawira Rusadi, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru Bandung, 2018. Marwan Gufron, *Peran Persatuan Islam*, Yudistira, Jakarta, 2017

politik merupakan dua hal yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang saling mendukung satu sama lain. Keduanya saling berkaitan dan menunjang satu sama lain dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat dalam suatu negara. Adapun salah satu partai yang memiliki kurangnya maksimal dalam memberikan sebuah pendidikan politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Purworejo dianggap kurang maksimal dalam memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat dikarenakan banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa politik itu kotor atau sering mendengarkan ucapan masyarakat bahwa politik itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dan kurangnya kesadaran dalam berpolitik. Hal tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa masih minimnya pemahaman tentang nilai-nilai politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai besar di Indonesia masih belum memberikan perhatian yang baik terhadap perkembangan pendidikan politik masyarakat.

Seperti yang terjadi pada tahun 2013 saat penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 58,53 %. Meskipun pada tahun 2018 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah mengalami kenaikan 8,98% menjadi 67,51%. Namun hal ini masih saja belum mencapai target yang ditentukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Hal ini tentunya perlu terus didorong agar masyarakat mempunyai kesadaran berpolitik (Yandip, n.d.). Ketua KPU Kabupaten Purworejo Dulrokhim juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Purworejo dari pemilu ke pemilu cenderung menurun. Di Jawa Tengah sendiri partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur 2008 sebanyak 62,46% dan 2013 sebanyak 58,52% (KPU, 2018). Melihat pentingnya peran partai politik dalam melakukan peranannya terutama dalam melakukan Pendidikan politik kepada masyarakat (pemilih) maka dengan ini penulis melakukan kajian ilmiah di salah satu partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Purworejo.

Mengingat salah satu faktor yang mempengaruhi faktor-faktor tersebut adalah rendahnya pendidikan politik yang dirasakan oleh masyarakat yang dilakukan oleh partai politik, karena sudah menjadi tugas bagi partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat karena partai politik dianggap paling memahami tentang politik dan situasi politik sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik, sehingga penting untuk menganalisis tentang bagaimana fungsi pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Purworejo sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Partai Politik. Tujuan dari penelitian ini Untuk menganalisis implementasi norma terkait fungsi pendidikan politik oleh DPC PDI Perjuangan di Kabupaten Purworejo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis pada penelitian hukum sosiologis atau empiris dimana penelitian awalnya ialah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat³ (Soerjono Soekanto. 2014: 10). Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket, serta data sekunder yaitu data yang diperoleh atau didapatkan dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi Kepailitan PT Star Prima

PDIP Perjuangan sebagai salah satu partai senior dalam percaturan perpolitikan di Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Pendidikan politik kepada seluruh kader, pengurus, simpatisan dan masyarakat luas guna membentuk warga negara yang melek politik dan bertanggung jawan terutama dalam bidang politik. Adapun tujuan umum PDI Perjuangan yang terdapat dalam Anggaran Dasar pada pasal 6 ayat 1 yakni “Membangun masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, adil, dan Makmur”. Tujuan khusus dari partai ini sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar pada pasal 7 ayat 1 yakni “Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat”. Kemudian selanjutnya fungsi dari partai ini sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar pada Pasal 8 Ayat 1 “Sebagai sarana guna membentuk dan membangun karakter bangsa”. Kemudian pada ayat 2 dikatakan “Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara”. PDI Perjuangan memiliki landasan yuridis yang jelas

³ Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI Press).

untuk melaksanakan Pendidikan politik kepada kader, pengurus, simpatisan, dan masyarakat luas sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tepatnya pada pasal 13 huruf (e) menyebutkan bahwa partai politik berkewajiban melakukan Pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi serta partisipasi anggotanya. Selain itu, partai politik juga berkewajiban melakukan Pendidikan politik bagi anggota partai politik dan juga masyarakat. Pada Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 34 ayat (3b) ditegaskan bahwa pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban Negara Indonesia dalam membangun etika budaya politik; dan
- 3) Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Dengan hal tersebut menunjukkan pendidikan politik memiliki tiga tujuan yakni yang pertama membentuk kepribadian politik, kedua membentuk kesadaran politik dan yang terakhir membentuk partisipasi politik.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pada bab XII Pasal 31 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwasannya, partai Politik dalam melakukan Pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab dengan memperhatikan keadilan kesetaraan gender dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- 3) Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemudian, kebijakan lain yang berkaitan dengan Pendidikan politik yakni pada Permendagri No 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Di dalam pemendagri ini dijelaskan mengenai fasilitas penyelenggaraan Pendidikan politik dapat diberikan terhadap kegiatan ini, antara lain:

- 1) Seminar dan lokakarya;
- 2) Sosilaisasi dan diseminisasi peraturan perundang-undangan;
- 3) Asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis;
- 4) Pagelaran seni dan budaya;
- 5) Jambore, perkemahan, napak tilas; dan

- 6) Berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film documenter dan cipta lagu.

Pendidikan politik adalah amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh setiap partai politik, khususnya pada penelitian ini yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Purworejo. Masyarakat di Kabupaten Purworejo merupakan target utama partai politik dalam mencapai tujuannya, baik selama pemilu maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Pendidikan politik menjadi kebutuhan penting di wilayah ini untuk memperbaiki budaya politik masyarakat. Hal ini karena melalui pendidikan politik, Kabupaten Purworejo dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap partai politik menjadi lebih positif. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kabupaten Purworejo telah menyelenggarakan Pendidikan Politik bagi masyarakat, namun masih ada ruang untuk peningkatan. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan dua perwakilan DPC PDI Perjuangan Purworejo, satu perwakilan PAC dan tiga perwakilan Pengurus Ranting, dimana pihak-pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang hampir serupa mengenai implementasi fungsi Pendidikan Politik dalam partai tersebut, serta kesesuaian implementasi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Menurut Bapak Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom, M.Si., selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kabupaten Purworejo, menyampaikan bahwasannya: “Pendidikan politik di kabupaten Purworejo pada praktiknya sudah tetapi porsinya yang belum, secara teknis administrasi sudah disesuaikan dengan pemendagri, yakni aturan yang diturunkan pemerintah terkait dengan tata cara pelaksanaan Pendidikan politik oleh partai politik, namun belum ideal karena angka partisipasi Pendidikan politik itu kan setiap tahunnya hanya beberapa orang. Sedangkan di Kabupaten Purworejo pemilihnya misalkan 600.000, dalam setahun yang dilaksanakan semua partai politik hanya bisa menjangkau 1000 orang dalam setahun, dalam 1000 orang sedangkan pemilih kita 600.000 persentasenya masih kecil banget. Jadi pada intinya sudah sesuai tetapi tetapi kondisinya belum ideal, karena porsi yang dijabarkan itu porsi partai politik dalam melakukan Pendidikan politik itu kan audiencenya atau peserta Pendidikan politik itu sendiri. Apalagi masing-masing parpol itu tidak banyak, misalkan PDI anggap saja 1000 orang, anggap saja total partai 17 partai, yang ada diparlemen 7 partai, 7 partai masing masing 1000 orang, berarti setiap tahun peserta Pendidikan politik 7000 orang sedangkan jumlah pemilih kita 600.000 orang, maka lebih banyak masyarakat yang belum pernah mengikuti Pendidikan politik. Bentuk Pendidikan politik yang dilakukan yakni ada sarasehan politik, bimbingan teknis, diskusi, dialog publik.

Dilaksanakan setahun mungkin 5-6 kali.” (Wawancara 17 November 2023, Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Purworejo)

Bagi PDI Perjuangan keharusan untuk melaksanakan Pendidikan politik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 telah diakomodir dalam Anggaran Dasar partai pada pasal 9 mengenai fungsi partai dalam ayat 1, 3, dan 6 secara berturut-turut “Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara”. Ayat 3 “Membentuk kader partai yang berjiwa pelopor dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Ayat 6 “Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara”.

Berikut merupakan beberapa kegiatan Pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo yang tidak tercantum didalam buku laporan tahunan Hasil wawancara menunjukkan bahwa DPC PDIP Kabupaten Purworejo telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan pendidikan politik yang sangat efektif dalam mendukung pendidikan politik selama tiga tahun terakhir (2020-2023). Beberapa kegiatan yang termasuk di dalamnya antara lain:

a. Pendidikan Politik Melalui Sosialisasi

Seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu yakni melaksanakan Pendidikan politik melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bapak Ir. Sudjadi DPR RI didampingi oleh Bapak Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom, M.Si. (Ketua DPC PDI Perjuangan Purworejo) beserta jajaran Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah Endro Sadewo (Sekertaris Fraksi PDI Perjuangan) dan Muhammad Hajar Zainudin, S.Sos, M.Hum. (Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan) dan pada 20 Mei 2023 mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan di halaman Rumah Dinas Ketua DPRD Purworejo .

Dengan tema Membangun Desa yang Berkeadilan dalam Kemakmuran dan Makmur dalam Keadilan untuk Mengurangi Stunting dan Kasus Miskin Ekstrim. Sejumlah 625 keluarga di Purworejo akan menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang berasal dari 76 Desa di Purworejo. Bapak Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom, M.Si. selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Purworejo menyampaikan bahwasannya “Dalam acara ini selain sosialisasi empat pilar juga dilakukan Rembuk Program yakni merupakan sinergi pembangunan dari tingkat desa hingga tingkat pusat. Rembug program ini

nantinya akan membantu Bapak Ir. Sudjadi dan teman-teman DPRD untuk merancang program yang bermanfaat untuk pedesaan.”

Selain itu tidak lupa memaparkan pendalaman terkait Pancasila mencakup pemahaman yang mendalam tentang lima sila yang menjadi dasar negara: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga melibatkan pengkajian terhadap sejarah dan pemikiran tokoh-tokoh yang berkontribusi pada pembentukan Pancasila, serta relevansinya dalam konteks zaman modern. Pendalaman terkait UUD 1945 mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, serta mekanisme perubahan dan amendemen konstitusi. Pendalaman terkait Bhinneka Tunggal Ika melibatkan pengertian akan keragaman budaya, agama, etnis, dan suku bangsa yang ada di Indonesia serta bagaimana menghormati dan menghargai perbedaan tersebut sebagai kekayaan bangsa. Pendalaman terkait NKRI mencakup pemahaman tentang prinsip keutuhan dan kedaulatan wilayah Indonesia, serta upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagamannya kebudayaan dan keberagaman yang ada. Pendalaman terhadap keempat pilar ini penting untuk membangun kesadaran nasional, memperkuat identitas bangsa, dan menjaga persatuan serta kedaulatan negara Indonesia.

b. Pendidikan Politik Melalui Sosial

Pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC Partai PDIP Kabupaten Purworejo diantaranya adalah:

- 1) Penyerahan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi oleh Muhammad Hajar Zainudin, S.Sos, M.Hum. DPRD Provinsi Jawa Tengah yang kemudian disampaikan kepada Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. S.Sos. Beasiswa Indonesia Pintar (PIP) ditujukan kepada 1.920an siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di Kabupaten Purworejo.
- 2) DPC PDIP Kabupaten Purworejo menyiapkan 200 paket bakti sosial peduli covid-19 yang berisikan sembako dan vitamin. Penyerahan bantuan secara simbolis digelar di Kantor DPC PDIP Perjuangan di Jalan Juanda Purworejo. Penyerahan bantuan dipimpin langsung oleh Ketua DPC sekaligus Ketua DPRD Purworejo yakni Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom, M.Si.
- 3) DPC PDIP Kabupaten Purworejo menggelar aksi sosial bertajuk Ramadhan Berbagi bersama Puan Maharani pada 27 April 2022. Dengan membagikan sebanyak 1.750 paket beras dan 5.000 paket sembako kepada warga di Kabupaten Purworejo. Paket yang dibagikan ini merupakan sumbangan dari Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. S.Sos., Anggota DPR RI Ir. Sudjadi, Anggota DPR RI Vita Ervina, S.E, Anggota DPRD Jawa Tengah Muhammad Hajar Zainudin, S.Sos, M.Hum. serta iuran anggota Fraksi PDIP Perjuangan Kabupaten Purworejo.
- 4) Melakukan gerakan menanam 1000 pohon sebagai wujud preservasi dan konservasi alam yang dilaksanakan di Desa Ganggeng, Kecamatan Purworejo bersama Anggota DPR RI

Fraksi PDI Perjuangan Ir. Sudjadi bersama DPC PDI Perjuangan dan Anak Ranting PDI Perjuangan se kecamatan Purworejo beserta warga masyarakat.

- 5) Komunitas Juang Kabupaten Purworejo melakukan kegiatan bersih-bersih pantai Jatimalang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan pengunjung pantai pentingnya menjaga ekosistem laut dari pencemaran sampah.

c. Pendidikan Politik Melalui Seni dan Budaya

- 1) Seperti yang terjadi pada 29 September 2022 Ketua DPRD Purworejo, bersama Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Hajar Zainudin, S.Sos, M.Hum. menghadiri sebuah acara Merti Dusun Desa Ganggeng, Kecamatan Purworejo yang diramaikan dengan acara Wayang Kulit Semalam Suntuk. Hal ini mengandung makna bahwasannya turut menjaga warisan budaya lokal Indonesia dan berharap masyarakat agar terus mencintai budaya tradisional agar tidak tergerus arus globalisasi sehingga jati diri bangsa selalu melekat didalam hati, juga turut menyampaikan bahwasannya kewarganegaraan untuk terus membumikan Pancasila dan menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika. Selain itu juga menyampaikan kepada masyarakat tentang konsep Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Dengan menerapkan konsep tersebut berharap lebih mengerti dan menempatkan diri sebangsa bangsa.
- 2) DPC PDI Perjuangan Purworejo pada 5 Juni 2022 mengadakan pameran lukisan tunggal karya Bramantyo, pentas musik dari Kasuga, dan pementasan monolog dari teater KTP di Gedung DPC PDI Kabupaten Purworejo. Acara ini secara resmi dibuka oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom, M.Si., dan berlangsung selama sepekan. Hadir juga Wakil Ketua Fraksi PDIP Jawa Tengah, Muhammad Hajar Zainudin, S.Sos, M.Hum. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Purworejo melalui seni dan budaya, serta mengangkat semangat seperti yang dilakukan oleh Bung Karno. Pameran lukisan Bung Karno juga bertujuan untuk memperkenalkan sosoknya kepada masyarakat, mengingat pengetahuan tentangnya semakin terkikis seiring berjalannya waktu.

d. Pendidikan Politik Melalui Keagamaan

- 1) Melakukan tahlilan untuk mendoakan arwah presiden pertama RI yaitu Ir. Soekarno di DPC Kota Madiun
- 2) Melakukan ziarah ke makam Ir Soekarno yang berada di Kota Blitar

e. Pendidikan Politik Melalui Organisasi Sayap Partai

Komunitas Juang

Komunitas Juang juga merupakan organisasi sayap partai dimana komunitas juang adalah salah satu mesin partai yang mengumpulkan kader muda PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Komunitas juang menjalankan peran penting sebagai wadah pengkrekrutan kader baru serta melakukan fungsi Pendidikan dan pelatihan terhadap kader-kader binaannya, diharapkan dapat menjadi kader yang berkompetensi, berkarakter, dan

berkapasitas. Dan untuk mempelajari ideologi marhaenisme yang merupakan ideologi yang berkeinginan menghilangkan penindasan, penganiayaan, pemerasan, penghisapan serta meninginkan adanya masyarakat yang adil dan Makmur melalui kemerdekaan nasional dengan adanya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Serta mempelajari tentang berpolitik di PDI Perjuangan.

f. Pendidikan Politik Melalui Seminar

- 1) Seminar ini bersifat tematik terkait isu isu yang muncul pada saat itu. Biasanya mengandung unsur Pancasila salah satunya adalah “Seminar Pemikiran Bung Karno”. Peserta dalam seminar yang dilaksanakan oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo adalah internal partai dan ditambah dengan masyarakat umum.
- 2) Konsolidasi bertujuan untuk memperkuat dan mempersatukan antar struktural partai. Konsolidasi bagi para kader dan anggota partai yang dilakukan PDIP Purworejo diikuti oleh PAC dan anak ranting serta menghadirkan petugas partai baik yang ada dilegislatif maupun eksekutif. Biasanya dilakukan tiga bulan sekali di Kantor DPC PDIP dengan membahas dinamika politik di Purworejo seperti jarring aspirasi masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom, M.Si., pada 10 Agustus 2020 menggelar konsolidasi politik untuk seluruh kader PDI Perjuangan di Kabupaten Purworejo. Konsolidasi dilaksanakan di Gedung KPN Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo pada tanggal 10-08-2020. Dengan mengusung tema “Tegak Lurus Rekomendasi Partai” dan dihadiri oleh jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Purworejo, pengurus PAC, dan Komunitas Juang Kabupaten Purworejo. (<https://derapjuang.id/featured/konsolidasi-politik-pdi-perjuangan-kabupaten-purworejo/>, diakses pada 16 Maret pukul 01.20)
- 3) Bedah Buku Bung Karno, merupakan salah satu kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo. Bedah buku Bung Karno dilaksanakan dengan sasaran internal partai maupun untuk masyarakat umum. Hal ini dengan tujuan untuk memahami pemikiran-pemikiran Bung Karno sebagai pendiri bangsa, penggagas, dan pencetus lahirnya Pancasila. Pemateri dalam bedah buku ini adalah senior PDIP Kabupaten Purworejo.
- 4) Dalam Rangka memperingati Bulan Bung Karno menyelenggara-rakan Talk Show dan nonton bareng film Bung Karno di Cangkring Park Desa Pucungroto, Kecamatan Kaligesing.

g. Pendidikan Politik Melalui Sekolah Partai

Kaderisasi partai merupakan pendidikan politik yang paling dasar dan penting yang harus dilaksanakan. Kaderisasi merupakan bentuk pendidikan politik formal yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kader dengan mentransfer dan menanamkan nilai-nilai atau ideologi tertentu di dalam sebuah partai, sehingga dapat menghasilkan kader-kader yang tangguh dalam jangka Panjang. Kesuksesan sebuah partai dapat diukur dari efektivitas proses kaderisasi internal yang diterapkan. Menurut tingkatannya, kaderisasi terdapat tiga tingkatan yakni:

- 1) Kader Pratama, merupakan kader PDIP yang terletak ditingkatan kabupaten atau kota.
- 2) Kader Madya, merupakan kader PDIP yang terletak ditingkatan provinsi.
- 3) Kader Utama, merupakan kader PDIP yang terletak ditingkatan pusat atau nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi fungsi pendidikan politik oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Di dalam Undang-Undang tersebut memberikan definisi bahwa pendidikan politik menjadi sebuah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo telah melakukan pendidikan politik berupa kaderisasi partai, konsolidasi partai, sarasehan, dan pertemuan rutin. Namun faktanya pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan belum dapat dilaksanakan dalam bentuk program yang terstruktur khusus untuk pendidikan politik. Tetapi bukan berarti DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo tidak menjalankan pendidikan politik. Pendidikan politik tetap dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan lain yang didalamnya juga terkandung aspek pendidikan politik.

Saran

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo sebaiknya terus melakukan upaya fungsi-fungsi partai politik yang salah satunya pendidikan politik secara terus menerus dan sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo. DPC PDI Perjuangan Purworejo agar lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pendidikan politik masyarakat dengan mengoptimalkan kendala-kendala keuangan yang ada dengan kegiatan-kegiatan yang minim anggaran melalui kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

DAFTAR REFERENSI

- Budiardjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan partai politik: sebuah bunga rampai*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia
- DPRD Kabupaten Purworejo, Anggota DPRD Purworejo Periode 2019-2024. Tersedia <https://dprd-purworejokab.go.id/anggota/>, diakses pada 16 Desember 2023 pada 10.00)
- Kantaprawira Rusadi, Sistem Politik Indonesia, Sinar Baru Bandung, 2018. Marwan Gufron, Peran Persatuan Islam, Yudistira, Jakarta, 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik

Redaksi (2022, Juni 5). <https://www.purworejo24.com/2022/06/isi-bulan-bung-karno-dpc-pdip-purworejo-gelar-pameran-lukisan-tentang-soekarno/>, diakses pada 16 Maret 2024, pukul 02:45)

Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI Press).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik